

BAHASA BALI DAN KECEMASAN GENERASI: PERGULATAN WACANA IDENTITAS DI KALANGAN KAUM TERDIDIK BALI

I Gusti Agung Paramita

Universitas Hindu Indonesia, Denpasar

Email: paramita@unhi.ac.id

Abstrak

Artikel ini berupaya menelusuri pergulatan wacana pelestarian bahasa Bali di kalangan kelas terdidik Bali di tahun 2001-2003. Wacana pelestarian bahasa Bali mulai mengemuka ketika muncul data ada penurunan penutur bahasa Bali di tahun 1990an. Penurunan jumlah penutur bahasa Bali itu, terutama terjadi pada penduduk golongan umur 5-9 tahun dan 10-14 tahun. Selain itu, Biro Pusat Statistik juga memprediksi tahun 2041 bahasa Bali bakal mati digantikan bahasa Indonesia. Situasi ini melahirkan kecemasan di kalangan kaum terdidik Bali akan terancam punahnya bahasa Bali. Kecemasan ini pun melahirkan pergulatan wacana seputar upaya pelestarian bahasa Bali. Respon para intelektual, dalam hal ini para pakar dan pemerhati bahasa, bisa diklasifikasi menjadi dua yakni mereka yang khawatir bahasa Bali akan punah jika tidak ada intervensi politik dari pemerintah dalam upaya pelestariannya, dan mereka yang optimis bahasa Bali akan terus hidup selama para pendukungnya tidak kehabisan akal untuk terus mengembangkannya.

Kata Kunci: bahasa Bali, pergulatan wacana, identitas.

Abstract

This article attempts to trace the struggle regarding the preservation of the Balinese language among the Balinese educated classes in 2001-2003. The discourse on preserving the Balinese language began to emerge when data emerged that there was a decline in Balinese speakers in the 1990s. The decline in the number of Balinese speakers occurred mainly in the population aged 5-9 years and 10-14 years. Apart from that, the Central Bureau of Statistics also estimates that in 2041 the Balinese language will die out, replacing Indonesian. This situation has given rise to concern among Balinese educated people that the Balinese language is threatened with extinction. This anxiety also gave rise to a discourse struggle surrounding efforts to preserve the Balinese language. The response of intellectuals, in this case language experts and observers, can be classified into two, namely those who are worried that the Balinese language will become extinct if there is no political intervention from the government in efforts to preserve it, and those who are optimistic that the Balinese language will continue to live as long as its supporters do not run out. makes sense to continue developing it.

Keywords: Balinese language, discourse rules, identity.

PENDAHULUAN

Bahasa menjadi salah satu penanda identitas budaya, selain unsur-unsur penanda identitas yang lain. Misalnya saja, bahasa daerah menjadi penanda dari identitas daerah. Begitu juga bahasa nasional menjadi penanda identitas nasional. Namun di antara kedua penanda identitas yang bersifat lokal, nasional bahkan global tersebut berpotensi terjadi tarik menarik dan saling mempengaruhi. Ketika bahasa nasional mendominasi bahasa daerah, bisa berdampak pada terpinggirkannya keberadaan bahasa daerah. Hal ini terjadi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman tradisi, budaya, agama, etnis, dan bahasa nusantara.

Berkaitan dengan posisi bahasa daerah dalam interaksinya dengan bahasa daerah lain termasuk bahasa nasional, Abdullah (2006: 94) menjelaskan tiga bentuk perkembangan bahasa nusantara (yang meliputi bahasa daerah) di Indonesia. *Pertama*, perkembangan yang disebabkan

oleh interaksi antarbahasa daerah itu sendiri yang diakibatkan oleh pertemuan langsung dua daerah, seperti yang terjadi di daerah perbatasan. Interaksi juga terjadi akibat proses mobilitas yang menyebabkan munculnya kelompok pemakai bahasa lain di suatu daerah.

Kedua, perkembangan bahasa nusantara disebabkan oleh interaksi bahasa daerah dengan bahasa nasional, terutama terjadi secara intensif sejak awal 1970an sejalan dengan proses formasi negara yang ditegaskan oleh pemerintah Orde Baru. Berbagai program, selain menyangkut bahasa nasional seperti penggunaan bahasa nasional di sekolah, kantor pemerintahan, dan berbagai ruang formal juga menyangkut berbagai kebijakan terkait dengan isu persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional tidak hanya telah menyebabkan kurang berkembangnya bahasa daerah di berbagai tempat akibat pembinaan bahasa daerah yang kurang, tetapi juga menyebabkan kurang berperannya bahasa daerah dalam menyumbangkan ide dan nilai untuk pembentukan identitas nasional.

Ketiga, perkembangan bahasa nusantara disebabkan oleh pertemuan bahasa sebagai dampak dari proses globalisasi, terutama sejak tahun 1980-an dan secara intensif berlangsung sejak tahun 1990-an. Isu ini menjadi jauh lebih penting menjelang milenium ketiga yang ditandai dengan orientasi global masyarakat yang lebih menyeluruh sehingga posisi bahasa nusantara dipertanyakan. Ketiga poin itu, menurut Abdullah (2006: 96), menjadi dasar dalam melihat posisi bahasa daerah dewasa ini, khususnya dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan pandangan Abdullah tersebut, bisa dikatakan bahwa posisi bahasa daerah, khususnya bahasa Bali tidak bisa dilepaskan dari tiga analisis perkembangan bahasa tersebut. *Pertama* bahasa Bali terancam oleh dominasi bahasa nasional dalam ruang-ruang formal. Ketika Bali mengintegrasikan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konsekuensi politiknya mesti mengikuti kebijakan dalam skala nasional termasuk penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kebijakan penggunaan bahasa nasional di sekolah-sekolah, kantor pemerintahan dan berbagai ruang formal menyebabkan semakin sempitnya ruang fungsional bahasa daerah. Media massa modern baik elektronik maupun cetak juga berpengaruh dalam upaya intensifikasi penggunaan bahasa nasional. *Kedua*, bahasa Bali mulai terpinggirkan oleh bahasa asing sebagai konsekuensi perkembangan industri pariwisata di Bali. Ketika pariwisata menjadi sektor utama penopang perekonomian Bali, maka orang Bali mulai memilih belajar bahasa asing agar bisa bekerja di dunia pariwisata. Selain itu, sistem pendidikan di sekolah tidak mendukung pelestarian bahasa daerah. Sudah menjadi rahasia umum, mempelajari bahasa Bali secara akademis dan praktis tidak dapat memberi nilai tambah, apalagi meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup (Sancaya, 2003: 209). Ini menyebabkan bahasa Bali semakin terpinggirkan secara fungsional, bahkan penuturnya kian berkurang. Bahasa Bali hanya digunakan di dalam aktivitas adat dan agama saja. Kekhawatiran semakin disfungsionalnya dan punahnya penutur bahasa Bali dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali melahirkan berbagai macam respon dari kalangan kelas terdidik. Respon tersebut muncul dalam bentuk pergulatan wacana pelestarian bahasa Bali. Studi ini berupaya menelusuri

dinamika pergulatan wacana pelestarian bahasa Bali di kalangan kaum terdidik dalam rentang tahun 2001-2003.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya analisis wacana media. Eriyanto (2008:4) membagi analisis wacana menjadi tiga pandangan. Pandangan pertama diwakili oleh kaum *positivisme-empiris*. Oleh penganut aliran ini bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan obyek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala atau distorsi. Sejauh ini ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris.

Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subyektif atau nilai yang mendasari pernyataannya, sebab yang penting adalah apakah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa dan pengertian bersama. Wacana lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran dan ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik (Eriyanto, 2008:4).

Pandangan kedua disebut sebagai *konstruktivisme*. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empirisme/positivisme yang memisahkan subyek dan objek bahasa. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas obyektif belaka dan yang dipisahkan dari subyek sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subyek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini seperti dikatakan A.S. Hikam (1996: 80) subyek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.

Analisis wacana dalam konteks ini dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subyek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan itu dilakukan di antaranya dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara.

Pandangan ketiga disebut sebagai *pandangan kritis*. Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. A.S. Hikam (1996:85) menjelaskan pandangan konstruktivisme masih belum menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana yang pada gilirannya berperan dalam membentuk jenis-jenis subyek tertentu berikut perilaku-perilakunya. Hal inilah yang melahirkan paradigma kritis. Analisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada

analisis konstruksivisme. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subyek netral yang bisa menafsirkan secara bebas, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang ada dalam masyarakat.

Menurut Hidayat (dalam Eriyanto, 2008: xi) kualitas suatu analisis wacana kritis akan selalu dinilai dari segi kemampuan menempatkan teks dan konteksnya yang utuh, holistik, melalui pertautan antara analisis pada jenjang teks dengan analisis terhadap konteks pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, *Critical Discourse Analysis* (CDA) berisi metode-metode yang menekankan *multilevel analysis*, mempertautkan analisis pada jenjang mikro (teks) dengan analisis pada jenjang meso ataupun makro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecemasan akan semakin punahnya penutur bahasa Bali berawal dari dirilisnya hasil sensus penduduk tahun 1990-an. Dari hasil sensus penduduk ini juga didapatkan data bahwa jumlah penutur bahasa Bali mengalami penurunan, yaitu 1, 69 persen tahun 1980-an menjadi 1, 64 persen di tahun 1990-an. Persentase ini didasarkan pada jumlah penduduk Indonesia pada kedua kurun waktu itu. Penurunan tersebut jelas terlihat pada laporan sensus tahun 1990. Di provinsi Bali tercatat 2.312.349 orang yang menyatakan bahasa Bali sebagai bahasa ibu, tetapi yang menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari berjumlah 2.301.337 orang. Penurunan jumlah penutur bahasa Bali itu, terutama terjadi pada penduduk golongan umur 5-9 tahun dan 10-14 tahun. (Balai Penelitian Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Denpasar 1998: 50). Seorang pakar bahasa dan budaya Bali, sebagaimana dikutip oleh Sancaya (2003: 208), pernah mengungkapkan bahwa bahasa Bali akan mati fungsinya pada tahun 2000, yaitu awal milenium ketiga. Tidak hanya itu, Biro Pusat Statistik juga memprediksi tahun 2041 bahasa Bali bakal mati digantikan bahasa Indonesia (Sarad, 14 Februari 2001: 11). Situasi ini melahirkan sebuah kekhawatiran bahkan kecemasan di kalangan kaum terdidik Bali akan terancam punahnya bahasa Bali.

Kekhawatiran ini tampak nyata dalam aspirasi dan pemikiran yang disampaikan di dalam kongres-kongres bahasa Bali yang diselenggarakan sejak tahun 1957 oleh pemerintah, termasuk di ruang-ruang seminar akademik. Pada hari Sabtu 26 Mei tahun 2001 misalnya, Program Studi Linguistik Universitas Udayana menyelenggarakan seminar dengan tema menantang yakni "Bahasa Bali di Ambang Kematian". Tidak terkecuali di halaman media massa, wacana kekhawatiran punahnya bahasa Bali juga disuarakan oleh kaum terdidik Bali, terutama para pemerhati dan pengajar bahasa Bali. Wacana kekhawatiran ini muncul seiring dengan dilaksanakannya Kongres Bahasa Bali ke V. Pada terbitan *Bali Post* Senin Pon, 29 Oktober Tahun 2001, IDG Windhu Sancaya dan I Nyoman Umbara menulis artikel berjudul "Menanggulangi Kemunduran Bahasa Bali". Dalam artikel tersebut penulis berupaya memberikan gambaran umum perihal kondisi bahasa Bali saat itu yang keberadaannya mulai terancam. Pemakaian bahasa Bali di kalangan masyarakat Bali pada

umumnya sudah mulai mengalami penurunan sejak lima puluh tahun terakhir. Berikut kutipan tulisannya.

"Bahasa Bali sebagai salah satu bahasa yang ada di dunia ketiga keadaannya mulai terancam. Pemakaian bahasa Bali di kalangan masyarakat Bali pada umumnya sudah mengalami penurunan sejak lima puluh tahun terakhir. Banyak anak maupun orang dewasa yang tinggal di lingkungan perkotaan kini menghadapi kesulitan yang makin besar untuk bisa berbahasa Bali dengan baik". (Bali Post, Senin Pon 29 Oktober 2001).

Sancaya dan Umbara melanjutkan bahwa perkembangan bahasa Bali dan kebudayaan Bali pada dasarnya merupakan proses dialektika. Maka dari itu, eksistensinya harus tetap dijaga dengan cara menghidupkan kembali segala fungsi yang dimilikinya, serta mengembangkannya sesuai dengan kenyataan dan kemajuan teknologi untuk menjaga kesinambungan kebudayaan Bali. Setidaknya ada tiga keputusan yang ditawarkan oleh dua akademisi yang juga dosen di Fakultas Sastra Universitas Udayana ini yakni *pertama* kemauan politik sesuai dengan era otonomi daerah saat ini, *kedua* pemberian pendidikan bahasa Bali untuk semua jenjang sekolah dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dan *ketiga* menyediakan alat linguistik seperti tata bahasa dan kamus bahasa Bali. Menurut Sancaya dan Umbara, masyarakat Bali tidak memiliki kamus bahasa Bali yang lengkap. Artinya, sebuah kamus yang disusun dengan mendefinisikan kata-kata dengan bahasa Bali itu sendiri. Meskipun cukup banyak Kamus Bahasa Bali yang diterbitkan, baik yang disusun oleh orang Bali maupun orang asing. Kamus bahasa Bali yang dibuat oleh orang asing justru lebih banyak daripada yang dibuat oleh orang Bali sendiri. Selain kamus *Kawi Balineesch-Nederlandsch Woordenboek* yang dibuat oleh H.N. Van Der Tuuk tahun 1912 dan yang dibuat oleh J. Kersten (1948), tidak ada kamus yang benar-benar dianggap sebagai kamus bahasa Bali.

Sancaya dan Umbara juga membahas perihal empat kategorisasi tingkat hierarki kosa kata bahasa Bali yang dikenal dengan *angghah ungguhing basa*. Mereka menganggap empat kategorisasi tersebut yakni *alus singgih*, *alus sor*, *alus mider* dan *kasar* tidak memungkinkan pemahaman yang baik terhadap kriteria-kriteria pemilihan kata sesuai dengan tingkat-tingkat situasi penuturan dalam masyarakat. Dilihat dari sudut analisis gramatikal, pembagian *angghah-ungguhing basa* menjadi empat dianggapnya tidak tepat. Berikut kutipan penjelasannya.

"Bila diteliti secara cermat, sebetulnya ada delapan kategori kata dalam konteks *angghah-ungguhing basa* tersebut. Oleh sebab itu harus dilakukan upaya untuk mendefinisikan ulang tentang empat kriteria *angghah-ungguhing basa* dalam bahasa Bali yang lebih sesuai dengan kenyataan bahasa Bali itu sendiri. Bila tidak maka akan selalu timbul kekacauan serta kesalahpahaman dalam menafsirkan bahasa Bali yang berakibat apda terhambatnya perkembangan bahasa Bali. Sistem *angghah-ungguhing bahasa Bali* dapat dikatakan sebagai bentuk gramatikalisasi dari sistem pikiran yang diwarisi dari epos Mahabharata dan Ramayana, khususnya yang berkenaan dengan keberadaan konsep Catur Warna". (Bali Post, Senin Pon 29 Oktober 2001).

Pandangan Sancaya dan Umbara tersebut segera mendapatkan respon yang bernada resistensi dari Made Kembar Karepun. Dalam Tabloid Taksu, November No. 73 Tahun 2001, ia menuliskan pandangan atau lebih tepatnya gugatan yang diberi judul "*Lupakan Angghah-ungguhing*

Bahasa Bali". Kembar Karepun menganggap mempertahankan sistem *angghah-ungguhing* bahasa Bali, dalam upaya pelestarian bahasa Bali, termasuk yang dilakukan oleh para pakar bahasa Bali, sebagai bentuk dukungan terhadap kembalinya tatanan feodal di Bali. Padahal, menurut Kembar Karepun, bahasa Bali mesti berkembang menjadi bahasa yang egaliter. Artinya, tidak relevan mempertahankan sistem *angghah-ungguhing* bahasa Bali di dalam kehidupan masyarakat Bali yang demokratis dan mengedepankan kesetaraan. Justru Kembar Karepun menganggap tatanan feodal dalam bahasa Bali sebagai penghambat dari pelestarian bahasa Bali itu sendiri. Oleh sebab itu, Kembar Karepun berpandangan bahwa Kamus yang diperlukan untuk orang Bali adalah kamus pasca-feodalisme yang tidak lagi melanggengkan tatanan feodal di masyarakat. Berikut kutipan kalimatnya.

"Menurut pendapat saya, salah satu cara menyelamatkan bahasa Bali dari keterpurukan dan kematiannya adalah menjadikan bahasa Bali sebagai bahasa yang egaliter sesuai dengan kecenderungan pemakainya kini. Bahasa yang egaliter bukanlah bahasa Bali yang vulgar dan kasar, tetapi bahasa kesetaraan, bahasa solidaritas. Sudah tiba waktunya istilah *angghah-ungguhing* bahasa dihapus dan diganti dengan istilah ragam bahasa atau istilah lain yang tidak berkonotasi membedakan derajat atau kedudukan penuturnya. Saya mengusulkan pembagian bahasa Bali menjadi tiga ragam yakni ragam formal, ragam madya dan ragam akrab". (Taksu, November No. 73 Tahun 2001).

Berangkat dari kutipan wacana tersebut, dapat dijelaskan bahwa telah terjadi dialektika wacana di kalangan intelektual Bali seputar *angghah-ungguhing* bahasa Bali di media massa. Mempertahankan *angghah-ungguhing* bahasa dalam upaya pelestarian dan perlindungan bahasa Bali dianggap sebagai masalah yang justru menyebabkan bahasa Bali semakin terpuruk. Begitu sebaliknya, menghapus *angghah-ungguhing* bahasa Bali dianggap sebagai upaya menyelamatkan bahasa Bali menuju bahasa yang lebih egaliter. Berangkat dari sini, bisa dijelaskan bahwa di internal orang Bali sendiri, khususnya di kalangan kaum terdidik, terdapat dinamika pemikiran yang bernada politik identitas di dalamnya. Di satu sisi ada pihak yang berupaya mempertahankan sistem tersebut, namun di sisi lain ada pihak yang ingin menghapusnya karena tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan.

Pergulatan wacana seputar kekhawatiran kian terpuruknya bahasa Bali terus berlanjut disusul diterbitkan lagi hasil pemikiran intelektual Bali yang lain seperti misalnya I Wayan Artika, seorang dosen IKIP Negeri Singaraja—sekarang bernama Undiksha—menulis perihal masa depan bahasa Bali yang sangat bergantung dari upaya menjadikannya bahasa cetak. Melalui tulisannya berjudul "Masa Depan Bahasa Bali, Menuju Bahasa Cetak" yang diterbitkan di Bali Post Sabtu Pon 3 November 2001, Ia mengusulkan agar ke depan semakin banyak produk bahasa Bali dalam bentuk media cetak yang muncul sebagai upaya pelestarian bahasa Bali. Ketiadaan media massa cetak berbahasa Bali menunjukkan keterdesakan bahasa Bali itu sendiri. Tidak berbeda dengan Wayan Artika, AA. Gde Putera Semadi juga menulis artikel berjudul "Bahasa Bali Menunggu Pendayung" pada Rabu Wage 14 November 2001 sebagai bentuk kekhawatiran terhadap semakin terpinggirkannya bahasa Bali dan berkurangnya penutur bahasa Bali. Bahkan sebuah majalah lokal

Bali, SARAD (No. 14 Tahun 2001) menerbitkan edisi khusus dengan judul "Bahasa Bali Dirundung Sepi".

Keprihatinan perihal nasib bahasa Bali memang menjadi perhatian banyak kalangan saat itu. Namun respon para intelektual, dalam hal ini para pakar dan pemerhati bahasa, bisa diklasifikasi menjadi dua yakni mereka yang khawatir bahasa Bali akan punah jika tidak ada intervensi politik dari pemerintah dalam upaya pelestariannya, dan mereka yang optimis bahasa Bali akan terus hidup selama para pendukungnya tidak kehabisan akal untuk terus mengembangkannya. Suara optimistik ini disampaikan oleh pakar dan pemerhati bahasa I Gusti Made Sutjaja ketika diwawancarai oleh *Bali Post* dan hasil wawancaranya diterbitkan pada Minggu Wage, 4 November 2001. I Gusti Made Sutjaja berpandangan bahwa tidak benar bahasa Bali akan mengalami kemandegan. Buktinya ada penciptaan *font* Bali yang diberi nama Bali Simbar—di mana *font* bisa masuk ke komputer sebagai perangkat lunak yang sekarang hampir ada di semua kantor. Ini menunjukkan bahwa bahasa Bali tidak mandeg, justru yang mandeg adalah kemampuan berpikir untuk mengembangkan bahasa Bali itu.

Jadi, menurut Sutjaja, bukan bahasa Balinya yang mati, melainkan cara berpikir untuk mengembangkan bahasa Bali yang mati. Dengan kata lain, kemandegan ada di ranah pemakainya, bukan pada bahasa Bali sebagai sebuah sistem untuk mengkomunikasikan berbagai hal. Menurut Sutjaja bahasa Bali sudah hidup beratus-ratus tahun, tidak mungkin mati dalam tempo beberapa tahun saja. Apalagi, sudah banyak aktivitas yang menggunakan media bahasa Bali seperti berita daerah di Radio, munculnya lagu daerah, bahkan media massa juga menyajikan kolom berbahasa Bali. Ini membuktikan bahwa bahasa Bali akan terus eksis jika para pemakainya masih punya ide dan pikiran untuk mengembangkannya.

Gerakan dalam upaya pelestarian bahasa dan aksara Bali sebagai bentuk politik identitas masyarakat umat Hindu di Bali memang terus dilakukan, hanya saja belum menemukan bentuk praktisnya. Bali pernah memiliki Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, namun belum begitu berdampak pada upaya pelestarian dan perlindungan bahasa Bali. Hal ini juga disampaikan oleh Sancaya (2003: 209) bahwa Perda tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali tersebut tidak banyak menolong nasib bahasa Bali, karena kurangnya *planning* dan *action* yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Perjuangan melindungi dan melestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini diakibatkan semakin terhimpitnya bahasa Bali di tengah gerusan era modern dan globalisasi. Wujud *action* tampak saat munculnya upaya pengangkatan penyuluh bahasa Bali di tahun 2016 dan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 perihal Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Dalam Pergub ini, khususnya pada bab III poin penggunaan Bahasa Bali dijelaskan bahwa bahasa Bali digunakan sebagai sarana komunikasi kehidupan keluarga Bali, komunikasi

segala kegiatan agama Hindu, adat dan budaya Bali dan pemberian informasi layanan masyarakat baik pada lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta sebagai pendamping bahasa Indonesia.

Selain itu, dalam pasal 4 Pergub tersebut dijelaskan bahasa Bali digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi oleh pegawai, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta pada hari Kamis, *Purnama*, *Tilem*, dan Hadi Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus. Namun dalam pasal 5 terdapat pengecualian beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan apel atau upacara bendera, kegiatan yang bersifat nasional dan internasional, kegiatan melibatkan instansi pusat dan kegiatan yang bersifat lintas provinsi dan lembaga.

Pergub perihal penggunaan bahasa Bali ini bisa dikatakan sebagai bentuk politik identitas dalam upaya melestarikan dan melindungi bahasa daerah sebagai penanda identitas daerah. Jika sebelumnya bahasa Bali tidak digunakan dalam ruang-ruang formal dan dominasi bahasa nasional termasuk bahasa asing cukup kuat, sejak terbitnya Pergub tersebut bahasa Bali mulai digunakan di ruang formal meskipun masih terbatas. Selain itu, bahasa Bali juga digunakan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, termasuk di daerah vital seperti bandara Ngurah Rai. Bisa dikatakan ini salah satu bentuk *action* yang sejak lama dinantikan oleh pihak-pihak yang mencemaskan kepunahan bahasa Bali. Perihal efektifitas Pergub dalam upaya pelestarian bahasa Bali disampaikan oleh koordinator penyuluh bahasa Bali tingkat Provinsi, I Wayan Suarmaja sebagai berikut.

"Pergub Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sepengetahuan saya masih berlaku. Hanya saja saya tidak bisa memastikan apakah di instansi pemerintahan seperti di Organisasi Perangkat Daerah masih diberlakukan, karena saya tidak terus-terusan memantau itu. Namun di dinas tempat saya bertugas masih dilaksanakan. Setiap rapat menggunakan bahasa Bali, terlebih ketika melayani masyarakat. Sejak adanya Pergub penggunaan bahasa Bali menjadi lebih intensif daripada sebelum adanya Pergub. Pelestarian aksara Bali juga terus dilakukan oleh tim penyuluh yang saat ini jumlahnya 639 orang". (Wawancara, 14 Juli 2022).

Pandangan yang sama juga disampaikan Dosen di Fakultas Sastra Universitas Udayana Putu Eka Guna Yasa sebagai berikut.

"Pergub No .80 tahun 2018 tentang penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali menjadi payung aturan yang berdampak positif. Dalam bidang bahasa, penggunaan bahasa Bali pada hari Kamis memantik berbagai kegiatan untuk menggunakan bahasa Bali. Setidaknya dalam ranah formal dan pemerintahan. Dalam bidang aksara, penggunaan aksara Bali di papan nama berbagai instansi, ruang publik, batas desa mendekatkan masyarakat Bali terhadap aksara ibunya. Hal ini berpengaruh terhadap antusiasme belajar aksara Bali yang selama ini didominasi aksara Latin. Dalam bidang sastra, melalui pergub ini dan bulan bahasa Bali, para sastrawan Bali diberikan penghargaan yang tinggi atas jasa-jasanya sebagai salah satu pilar penyangga estetika Bali. Bali adalah satu-satunya provinsi yang menyelenggarakan bulan bahasa Bali secara khusus. (Wawancara, 14 Juli 2022).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa intervensi politik pemerintah dalam hal ini Gubernur Bali dalam upaya perlindungan dan pelestarian identitas daerah seperti bahasa, aksara dan sastra Bali ternyata cukup berpengaruh dalam menghadirkan bahasa Bali di ruang-ruang publik. Jika sebelumnya bahasa Bali hanya digunakan dalam aktivitas adat dan agama saja, melalui Pergub tersebut bahasa Bali mulai dihadirkan di ruang formal, termasuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pendidikan. Perlindungan dan pelestarian bahasa Bali juga dilakukan melalui penyelenggaraan bulan bahasa Bali—selama ini hanya Provinsi Bali yang memiliki agenda tersebut. Ini salah satu bentuk perjuangan atas eksistensi bahasa daerah sebagai penanda identitas etnik masyarakat Bali yang keberadaannya terancam. Hal ini sejalan dengan pandangan Eriksen (2002: 76) bahwa identitas etnis menjadi sangat penting saat ia dianggap berada di bawah ancaman. Ekspresi identitas etnis juga dianggap sebagai alat simbolis dalam perjuangan politik.

Tidak hanya dalam konteks bahasa saja, upaya *positioning* aksara Bali di antara bahasa dan huruf latin juga menjadi bagian penting untuk dirumuskan. Melalui Pergub No. 80 Tahun 2018, terutama pada pasal 6, ada kewajiban menuliskan aksara Bali dalam penulisan nama baik itu tempat persembahyangan umat Hindu, lembaga adat, prasasti peresmian gedung, lembaga pemerintahan, lembaga swasta, jalan, sarana pariwisata dan fasilitas umum lainnya. Aksara Bali juga dapat digunakan dalam penulisan tempat ibadah umat beragama lainnya. Menariknya, dalam Pergub tersebut juga diatur pemosisian aksara Bali di antara huruf latin. Aksara Bali ditempatkan di atas huruf latin dalam penulisan nama. Pengaturan pemosisian ini menunjukkan bahwa ada upaya memposisikan identitas daerah lebih tinggi daripada identitas nasional. Bisa dikatakan ini bagian dari "politik pengakuan" (*politic of recognition*) karena pengakuan adalah prasyarat penting dari eksistensi kelompok identitas. Pengakuan tersebut datang baik dari negara maupun kelompok identitas lain (Laode, 2018: 16).



Gambar 01. Gubernur Bali Ir. Wayan Koster saat meresmikan plang nama Bandara I Gusti Ngrurah Rai yang menggunakan aksara Bali. (dokumentasi pribadi).

Kewajiban menuliskan aksara Bali pada papan nama lembaga pemerintahan, termasuk lembaga swasta, fasilitas pariwisata mendapatkan respon yang cukup baik. Beberapa perusahaan besar milik negara seperti BUMN mulai mengubah papan namanya dan memberikan ruang pada aksara Bali. Misalnya saja di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pintu masuk utama wisatawan internasional yang berkunjung ke Bali, sudah terpampang aksara Bali di atas plang nama bandara tersebut. Perusahaan-perusahaan swasta asing kelas dunia yang bergerak menjual makanan cepat saji seperti McDonald's dan KFC juga diwajibkan menuliskan aksara Bali di plang nama perusahaannya.



Gambar 02. Aksara Bali pada plang makanan cepat saji kelas dunia Mc Donald'S di Jalan Gatot Subroto Timur. (dokumentasi pribadi).

Ini menarik, selama ini McDonald's dan KFC menjadi simbol dunia barat, khususnya Amerika yang mampu menginvasi industri bisnisnya ke berbagai belahan dunia. McDonald's juga simbol kehidupan modern dengan pelayanan yang efektif dan efisien. Bahkan teoretisi George Ritzer menggunakan istilah McDonaldisasi untuk menggambarkan fenomena munculnya industri-industri raksasa yang menjalar secara global dengan ide rasionalitas sebagai faktor determinan yang kemudian mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat.



Gambar 03. Aksara Bali pada plang nama toko smart phone. Bahasa Inggris yang beraksara Bali (dokumentasi pribadi).

Kewajiban menggunakan aksara Bali pada plang nama instansi pemerintahan, perusahaan dan lembaga swasta dibarengi dengan upaya-upaya penertiban. Pemerintah Bali menugaskan Satpol PP untuk memantau plang-plang nama instansi pemerintahan, lembaga swasta termasuk hotel dan villa yang tidak menggunakan aksara Bali. Jika ada yang tidak mematuhi Pergub tersebut, maka tidak tanggung-tanggung akan diberikan surat teguran, bahkan dilakukan penertiban secara langsung. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menjaga taksu Bali sekaligus melestarikan budaya Bali. Penggunaan aksara Bali dianggap bagian dari membangkitkan taksu pulau Bali.

Bisa dijelaskan bahwa kewajiban menggunakan bahasa, aksara, dan sastra Bali yang termuat dalam Pergub merupakan bagian atau bentuk dari politik identitas yang melibatkan kekuatan institusi negara—dalam hal ini Pemerintah Daerah Bali. Hal ini dilakukan ketika bahasa, aksara dan sastra Bali mulai terancam keberadaannya disebabkan oleh dominasi bahasa nasional dan bahasa asing sebagai konsekuensi pesatnya perkembangan industri turisme, modernisasi dan globalisasi. Oleh masyarakat Bali, bahasa, aksara dan sastra Bali tidak sekadar penanda identitas daerah, tetapi juga “kunci wasiat” dalam memahami sistem keyakinan, ruang bathin dan pengetahuan tradisional warisan leluhur mereka. Oleh sebab itu, pelestarian dan perlindungan bahasa, aksara dan sastra Bali merupakan bagian dari upaya pelestarian dan perlindungan pengetahuan tradisional warisan leluhur mereka. Hal ini juga mengindikasikan terjadi titik balik, bahwa modernitas dan globalisasi melahirkan gerakan justifikasi hal-hal yang bersifat lokal dan tradisional. Kehadiran globalisasi secara tidak langsung mengancam identitas partikular, sehingga menyebabkan munculnya kesadaran penguatan identitas lokal.

KESIMPULAN

Wacana pelestarian bahasa Bali mulai mengemuka ketika muncul data ada penurunan penutur bahasa Bali di tahun 1980an. Penurunan jumlah penutur bahasa Bali itu, terutama terjadi pada penduduk golongan umur 5-9 tahun dan 10-14 tahun. Selain itu, Biro Pusat Statistik juga memprediksi tahun 2041 bahasa Bali bakal mati digantikan bahasa Indonesia. Situasi ini melahirkan sebuah kekhawatiran bahkan kecemasan di kalangan kaum terdidik Bali akan terancam punahnya bahasa Bali. Kecemasan ini pun melahirkan pergulatan wacana seputar upaya pelestarian bahasa Bali. Respon para intelektual, dalam hal ini para pakar dan pemerhati bahasa, bisa diklasifikasi menjadi dua yakni mereka yang khawatir bahasa Bali akan punah jika tidak ada intervensi politik dari pemerintah dalam upaya pelestariannya, dan mereka yang optimis bahasa Bali akan terus hidup selama para pendukungnya tidak kehabisan akal untuk terus mengembangkannya. Upaya pelestarian bahasa dan aksara Bali menemukan bentuk konkretnya ketika ada upaya pengangkatan penyuluh bahasa Bali di tahun 2016 dan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 perihal Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

Pergub perihal penggunaan bahasa Bali ini bisa dikatakan sebagai bentuk politik identitas dalam upaya melestarikan dan melindungi bahasa daerah sebagai penanda identitas daerah. Jika sebelumnya bahasa Bali tidak digunakan dalam ruang-ruang formal dan dominasi bahasa nasional termasuk bahasa asing cukup kuat, sejak terbitnya Pergub tersebut bahasa Bali mulai digunakan di ruang formal meskipun masih terbatas. Selain itu, bahasa Bali juga digunakan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, termasuk di daerah vital seperti bandara Ngurah Rai. Bisa dikatakan ini salah satu bentuk *action* yang sejak lama dinantikan oleh pihak-pihak yang mencemaskan kepunahan bahasa Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Irwan. (2006). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afif, Afthonul. (2015). *Teori Identitas Sosial*. Yogyakarta: UII Pres.
- Anderson, Benedict. (2008). *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Kerjasama Penerbit INSIST dan Pustaka Pelajar.
- Ardika, I Wayan, dkk. (2015). *Sejarah Bali dari Prasejarah hingga modern*. Denpasar: Udayana Press.
- Artika, Wayan. (2002). *Masa Depan Bahasa Bali, Menuju Bahasa Cetak*. Bali Post Sabtu Pon 3 November 2001.
- Ardhana dkk, I Ketut. (2011). *Masyarakat Multikultural Bali. Tinjauan Sejarah, Migrasi dan Integrasi*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- (2012). *Komodifikasi Identitas Bali Kontemporer*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Atmaja, Nengah Bawa. (2010). *Ajeg Bali: Gerakan Identitas Kultural dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Dharma Putra, I Nyoman & Pitana, I Gde (ed). (2011). *Bali dalam Proses Pembentukan Karakter Bangsa*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Dharma Putra & Ardika, I Wayan. (2004). *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Balimangsi Press.
- Dwipayana, AA GN Ari. *Melewati Benteng Ajeg Bali*. Pengantar untuk Buku Henk Schulte Nordholt, Bali: Benteng Terbuka 1955-2005, 2010.
- Fearon, James. D. (2020). *Tentang Identitas*. Jawa Tengah: Paris Pustaka.
- Geriya, I Wayan. (2008). *Tranformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Surabaya: Paramita.
- Haryatmoko. 2019. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Karepun, Made Kembar. (2001). *Lupakan Anggah-ungguhing Bahasa Bali*. Tabloid Taksu, November No. 73 Tahun 2001.
- Paramita, I Gusti Agung. (2015). *Wacana Kebudayaan dalam Dinamika Pers di Arena Politik Lokal*. Tesis di Program Studi Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia.

Sarad, Majalah Gumi Bali. (2001). *Bahasa Bali Dirundung Sepi*. Yayasan Gumi Bali.

Sancaya, IDG Windhu dkk. (2001). *Menanggulangi Kemunduran Bahasa Bali*. *Bali Post* Senin Pon, 29 Oktober.

Sujana, Nyoman Jaya. (1989). *Perubahan Kebudaaan dan Semakin Memudarnya Kebalian Orang Bali Dewasa Ini*. Makalah tidak diterbitkan.